

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Analisis Kinerja BUMdes “Mitra Usaha Makmur” Dalam Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Susukan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas  Jaryo, Tohir (2019)	1. BUMDes 2. Desa 3. Kinerja	Kualitatif	Hasil penelitian terhadap kinerja BUMDes “Mitra Usaha Makmur” Desa Susukan ditinjau dari pengaruhnya terhadap penerimaan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Susukan sudah mampu memberikan kontribusinya dalam pemberian sumbangan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Susukan sejak tahun 2018 yaitu sebesar 18 juta dengan total omset BUMDes “Mitra Usaha Makmur” tahun 2017 sebesar 93 juta. Pada tahun 2019 ini BUMDes “Mitra Usaha Makmur” di

				taergetkan memberikan sumbangan penerimaan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Susukan sebesar 66 juta.
2.	<p>Analisis Kinerja BUMDes di Kabupaten Luamajang</p> <p>Ach. Qosjim (2017)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kinerja Kelembagaan</li> <li>2. BUMDes</li> </ol>	Analisis Deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tata kelola kelembagaan merupakan factor kunci penentu keberhasilan usaha dari setiap jenis BUMDes. Hal ini disebabkan karena setiap jenis usaha BUMDes tidak berdiri sendiri tetapi memiliki kaitan mata rantai dengan factor lain yang sangat mempengaruhi keberlanjutan usaha. Keterkaitan ini bagaikan sebuah mata rantai apabila rantai ini putus maka usaha yang dilakukan oleh BUMDes akan terpengaruh.</li> <li>2. Keberlanjutan BUMDes sangat dipengaruhi oleh skala dan jangkauan usaha. BUMDes yang menjalankan bisnis internal</li> </ol>

				(melayani kebutuhan warga setempat, seperti kebutuhan pokok, persewaan hand traktor) dengan jangkauan dan berskala lokal, umumnya menghadapi risiko yang rendah sehingga bisa berjalan sehat dan berkelanjutan.
3.	Keberadaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa  Sentosa Sembiring (2017)	1. Badan Usaha Milik Desa 2. Pendapatan Asli Desa 3. Peraturan Desa 4. Kesejahteraan	Yuridis Normatif	Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang dilakukan secara professional sehingga menghasilkan keuntungan dapat menjadi sumber tambahan dalam meningkatkan PADes.
4.	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa	1. Peranan BUMDes Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa	Kualitatif	Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa sebagai fasilitator, mediator, dinamisator mengalami peningkatan. Peranan BUMDes lanjut sudah melakukan tugas sesuai dengan acuan

	Ade Eka Kurniawan (2016)			BUMDes tersebut, tetapi terjadi tidak sesuai dengan yang diinginkan, hanya meningkat Rp. 3.940.000 saja.
5.	Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kemiri Kabupaten Jember Berdasarkan Pendekatan <i>Balanced Scorecard</i>  Faris Widyatmoko (2016)	1. Kinerja 2. BUMDes 3. <i>Balanced Scorecard</i>	Kuantitatif	Nilai skor tertimbang riil (BUMDes “Kembang”) yaitu sebesar 370,05. Hasil skor tertimbang tersebut akan dibagi dengan skor tertimbang maksimal yaitu 500,05. Sehingga dari hasil pembagian nilai skor tertimbang dengan nilai skor tertimbang maksimal dikali 100 adalah 74. Oleh karena itu berdasarkan table penelitian kesehatan BUMDes Kembang Desa Kemiri berada pada kondisi sehat dengan kategori A.
6.	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Padang Jaya Kecamatan	1. Peran 2. BUMDes Amanah 3. Pendapatan Asli Desa	Deskriptif Kualitatif	Melalui pengelolaan keuangan yang baik dengan alur akuntansi, melalui pengelolaan asset desa yang menjadi sumber usaha seperti unit air bersih, unit kebun desa, dan unit pasar desa, pengelola BUMDes Amanah

	<p>Kuaro Kabupaten Paser</p> <p>Yoni Pramilu W. Dr. Iman Surya, Sos, Msi Eddy Iskandar, S,Sos, Msi (2017)</p>			<p>sudah mampu mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu sebagai agen BRILink. BUMDes Amanah sudah berperan dalam meningkatkan pendapatan Asli Desa melalui tiga unit tersebut.</p>
7.	<p>Analisis Pengukuran Kinerja Organisasi Dengan Metode <i>Balanced Scorecard</i> (Pada KSU Karyawan Pemerintah Kota Semarang)</p> <p>Syamsiyah, Naili Farida, &amp; Rodhiyah (2013)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengukuran Kinerja</li> <li>2. Koperasi</li> <li>3. <i>Balanced Scorecard</i></li> </ol>	Kualitatif Deskriptif	<p>Hasil penelitian menunjukkan kinerja koperasi berada pada posisi sehat untuk nilai skor yang diperoleh empat prespektif. Kesimpulan bahwa <i>Balanced Scorecard</i> dapat digunakan sebagai metode pengukuran kinerja pada koperasi secara lebih komperhensif dengan tidak mengabaikan aspek non keuangan yang menjadi pendorong bagi kemajuan koperasi.</p>
8.	<p>Analisis Kinerja Karyawan BUMDes Di Kabupaten Kampar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kinerja</li> <li>2. Kompetensi Potensi</li> <li>3. Kompetensi Realitas</li> <li>4. Motivasi</li> </ol>	Kuantitatif	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai, kompetensi potensi, kompetensi dan motivasi pegawai BUMDes realitanya</p>

	Jonnius (2015)			<p>termasuk dalam kategori tinggi. Temuan lainnya adalah kenyataan bahwa kompetensi dan motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, sedangkan kompetensi potensial menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan. Ketiga variabel bebas menunjukkan hubungan yang cukup kuat dengan variabel terikat, serta uji determinasi menunjukkan 44,4% variasi kinerja pegawai dapat dijelaskan oleh variasi potensi variabel kompetensi, kompetensi dan motivasi realitas, sedangkan sisanya 55,6% dijelaskan oleh faktor selain tiga variabel.</p>
9	Penerapan Balanced Scorecard Sebagai Alternatif Pengukuran Kinerja Pada PT. BANK	1. Balanced Scorecard 2. Pengukuran Kinerja	Kualitatif Deskriptif	<p>Hasil penelitian Perspektif keuangan PT. Bank Sulutgo mampu mempertahankan pendapatan atau penjualan bersih. juga berhasil mempertahankan</p>

	<p>SULUTGO Cabang Ratahan</p> <p>Reska Brigita, Jantje J. Tinangon dan Anneka Wangkar (2021)</p>		<p>profitabilas perusahaan terhadap nilai asetnya PT. Bank Sulutgo mampu memaksimumkan laba bersih Perspektif pelanggan, tingkat retensi pelanggan PT. Bank Sulutgo mengalami peningkatan Perspektif bisnis internal, PT Bank Sulutgo sudah baik dan mampu meningkatkan pelayanan serta layanan purna jual yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan. Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran pada PT. Bank Sulutgo mampu merealisasikan program pengembangan sumber daya manusia (SDM)</p>
--	--	--	---

**Persamaan dalam penelitian ini :**

Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu membahas Kinerja BUMDes sebagai fokus penelitian dan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini mempunyai persamaan dalam menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang menggunakan wawancara, observasi, serta dokumentasi.

### **Perbedaan dalam penelitian ini :**

Perbedaan dari penelitian ini dan penelitian terdahulu yaitu terletak dari variabel penelitian serta objek penelitian. Jika penelitian terdahulu meneliti tentang Analisis Kinerja BUMDes Dalam Pengelolaan Aset. sedangkan pada penelitian ini meneliti Analisis Kinerja Bumdes Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

## **2.2 Tinjauan Teori**

### **2.2.1 Akuntansi Sektor Publik**

Epistemologi kata “Akuntansi Sektor Publik” adalah akan dieksplorasi. Dari berbagai buku *Anglo* Amerika, akuntansi sector public diartikan sebagai mekanisme akuntansi swasta yang diberlakukan dalam praktek organisasi publik. Sementara itu dari berbagai buku lama terbitan Eropa Barat, akuntansi sektor public disebut sebagai akuntansi pemerintahan, dan di berbagai kesempatan bidang ini disebut akuntansi keuangan public. Dari hasil perkembangan terakhir disebut sebagai dampak keberhasilan penerapan dasar akrual di Selandia Baru, pemahaman ini telah berubah. Akuntansi sector public didefinisikan sebagai akuntansi dana masyarakat. Akuntansi dana masyarakat dapat diartikan sebagai “Mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat” (Bastian, 2010)

Dari definisi tersebut, maka dana masyarakat perlu diartikan sebagai dana yang dimiliki oleh masyarakat, bukan individual, yang biasanya dikelola oleh organisasi-organisasi sector public, serta pada proyek-proyek kerja sama sektor

public dan swasta. Definisi ini dapat dikembangkan dengan melihat lebih jauh batasan penulis tentang organisasi sector public di Indonesia : “Lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan LSM-LSM termasuk yayasan-yayasan sosial. (Bastian, 2010)

### **2.2.2 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Pengertian BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa menurut Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa serta masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa dijelaskan bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. (Tohir & Jaryono: 2019)

BUMDes merupakan badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Desa dengan modal awal bersumber dari APB Desa. Modal selanjutnya tidak hanya dari Pemerintah Desa, tetapi juga dapat berasal dari masyarakat Desa maupun pihak lain, seperti bantuan dari Pemerintah. BUMDes sebagai lembaga ekonomi serta sekaligus lembaga sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan mempupuk modal masyarakat Desa. (Yabbar & Hamzah :2015)

BUMDes adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modal dan pengelolaannya dimiliki oleh desa dan masyarakat melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset

jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Desa dapat mendirikan bumdes berdasarkan peraturan Desa tentang pendirian bumdes usaha desa adalah jenis usaha berupa pelayanan ekonomi Desa seperti usaha jasa penyaluran sembilan bahan pokok perdagangan hasil pertanian serta industri dan kerajinan rakyat. Pendirian bumdes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan atau kerjasama antar desa.

### **2.2.3 Kinerja Organisasi Publik**

Secara etimologis, kinerja berasal dari kata dasar “kerja”. Kinerja dalam sebuah organisasi merupakan jawaban dari hasil kerja yang berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah direncanakan sebelumnya. Kinerja merupakan sebuah pencapaian hasil atau *degree of accomplishment* dimana kinerja organisasi dapat kita lihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. (Wahyudi, Adam. & Mahdani, 2018). Istilah kinerja juga sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja dapat diukur apabila mempunyai tolak ukur yang sesuai dengan tujuan tertentu yang hendak akan dicapai.

Kinerja adalah hasil pencapaian kerja yang telah dilakukan baik oleh individu maupun kelompok organisasi dalam pelaksanaan program, kegiatan, serta kebijakan untuk mewujudkan visi, misi, sasaran maupun tujuan organisasi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam pengelolaan sebuah organisasi tentunya membutuhkan sumber daya baik bersifat fisik maupun non fisik. Sumber daya

fisik contohnya adalah peralatan, financial, energi dan manusia atau SDM, sedangkan non fisik contohnya ialah peraturan, informasi, dan kebijakan. Oleh sebab itulah kinerja organisasi juga dipengaruhi oleh sumber daya tersebut. Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah sebuah hasil pencapaian kerja yang telah dilakukan baik oleh individu maupun kelompok organisasi dalam pelaksanaan kegiatan, program, serta kebijakan untuk tercapainya visi, misi, maupun tujuan organisasi yang telah direncanakan sebelumnya (Macella, 2020)

### **2.2.3.1 Pengukuran Kinerja Organisasi Publik**

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian peningkatan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya oleh perusahaan. Stefan Tangen dalam Engelbert Christian (2010) menyatakan bahwa :

“Sistem pengukuran kinerja yang baik adalah sekumpulan ukuran kinerja yang menyediakan perusahaan dengan informasi yang berguna sehingga membantu mengelola, mengontrol, merencanakan dan melaksanakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. “

Berikut ini terdapat beberapa metode pengukuran kinerja.

#### *1. Balanced Scorecard (BSC)*

Balanced Scorecard dikembangkan oleh Kaplan (1992) dan Norton (1996) dengan berpandangan kepada empat perspektif., yaitu : (i) perspektif keuangan, (ii) perspektif pelanggan, (iii) perspektif internal, dan (iv) perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. BSC bukan merupakan daftar pengukuran statis, melainkan sebuah kerangka logis untuk melaksanakan dan menyelaraskan program-program yang berfokus pada

strategi. Scorecard menerjemahkan visi dan strategi unit bisnis ke dalam tujuan dan ukuran di empat perspektif yang berbeda. (Rangkuti, 2011)

### *2. Performance Pyramid System (PPS)*

*PPS* adalah sebuah sistem yang saling terkait dari variable kinerja yang berbeda, yang dikontrol pada tingkat organisasi yang berbeda. Tujuan dari kinerja piramida adalah link suatu strategi organisasi dengan operasi-operasi dengan menerjemahkan tujuan-tujuan dari atas ke bawah (prioritas pelanggan) dan pengukuran dari bawah ke atas. Pengukuran kinerja ini mencakup empat tingkat tujuan yang membahas efektivitas organisasi eksternal (sisi kiri piramida) dan efisiensi internal (sisi kanan piramida).

Lynch dan Cross (1992) menyatakan bahwa :

“Kinerja piramida berguna untuk menggambarkan bagaimana tujuan dikomunikasikan sampai ke tingkat operasional dan bagaimana langkah-langkah yang disampaikan kembali ke tingkat yang lebih tinggi.”

Kekuatan utama *PPS* adalah usahanya untuk mengintegrasikan tujuan-tujuan perusahaan dengan indikator kinerja operasional. Namun, pendekatan ini tidak menyediakan mekanisme untuk mengidentifikasi indikator kinerja kunci dan juga tidak secara eksplisit mengintegrasikan konsep perbaikan terus-menerus. (Jufina, 2016)

### *3. The Tableau de Bord (TdB)*

Metode ini pertama kali dikembangkan oleh para insinyur yang sedang mencari cara untuk meningkatkan proses produksi mereka dengan pemahaman yang lebih baik. Metode ini pertama kali diperkenalkan di

Perancis pada tahun 1930-an. Menurut Epstein dan Manzoni, tujuan awal ini yang memberikan manajer uraian dan parameter kunci untuk mendukung pengambilan keputusan yang memiliki dua implikasi penting. Pertama, TdB tidak dapat menjadi dokumen tunggal yang berlaku sama baik untuk seluruh perusahaan karena setiap sub-unit memiliki tanggung jawab dan objektif yang berbeda. Ini menyebabkan harus adanya TdB untuk setiap sub-unit. Kedua, berbagai TdBs yang digunakan dalam perusahaan tidak boleh terbatas pada indikator-indikator keuangan. Kelemahan terbesar yang mungkin berasal dari TdB adalah struktur yang tidak terdefiniskan. Hal ini dikarenakan kurangnya daerah kerja yang ditetapkan. Risiko yang dapat terjadi yaitu manajer melaksanakan TdB dengan seperangkat indikator kinerja yang tidak seimbang dalam hal keuangan dan non-keuangan, lead dan lag, strategis dan operasional dan terkait dengan efektivitas dan efisiensi. (Jufina, 2016)

#### 4. *Productivity Measurement and Enhancement System (ProMES)*

*ProMES* dikembangkan oleh Pritchard pada awalnya. *ProMES* didasarkan pada teori perilaku kerja. Dalam teori ini, motivasi dipandang sebagai suatu proses alokasi sumber daya ke seluruh tindakan dan tugas, dimana sumber daya tersebut adalah waktu dan tenaga seseorang. Pritchard dan kawan-kawannya menyatakan bahwa kekuatan motivasi seseorang adalah hasil dari tindakan, produk, evaluasi, hasil dan terpenuhinya kebutuhan orang tersebut. Sistem *ProMES* dapat

dikembangkan dan diimplementasikan dengan tujuh langkah sebagai berikut :

1. Membentuk tim desain yang terdiri dari orang-orang yang akan diukur, pengawas dan fasilitator yang mengerti *ProMES*
2. Identifikasi tujuan untuk unit.
3. Mengidentifikasi salah satu ukuran lebih kuantitatif (indikator) untuk setiap tujuan yang ditetapkan.
4. Menetapkan kemungkinan.
5. Desain sistem umpan balik.
6. Menanggapi umpan balik.
7. Memonitoring proyek dari waktu ke waktu.

Salah satu fitur yang paling menarik dari *ProMES* adalah pendekatan bottom-up. Namun, pendekatan ini juga memiliki kekurangan yaitu bahwa konsistensi vertikal tidak dapat diterima begitu saja yang dapat mengakibatkan pengukuran kinerja unit bisnis tidak sejalan dengan pengukuran kinerja perusahaan. Kelemahan dari *ProMES* adalah bahwa indikator tidak harus selalu diimbangi jika tujuan tidak seimbang. (Jufina, 2016)

##### 5. *Sink and Tuttle*

Metode pengukuran kinerja *Sink and Tuttle* adalah sebuah pendekatan klasik yang menyatakan bahwa kinerja suatu organisasi memiliki keterkaitan yang rumit antar tujuh kriteria kinerja. Ketujuh kriteria kerja tersebut, antara lain :

- a) Efektivitas
- b) Efisiensi
- c) Kualitas
- d) Produktivitas
- e) Kualitas kehidupan kerja
- f) Inovasi
- g) Profitabilitas/ budgetability

#### 6. *Theory of Constraints (TOC)*

*TOC* dikembangkan oleh Goldratt pada pertengahan tahun 1980-an sebagai suatu proses perbaikan yang berkelanjutan. *TOC* dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi kendala sistem
2. Memutuskan bagaimana memanfaatkan sistem kendala
3. Tidak memprioritaskan segala sesuatu yang lain di atas keputusan.
4. Meningkatkan sistem kendala
5. Ketika sebuah kendala rusak, kembali ke langkah (1)

Dalam pengukurannya, *TOC* digunakan untuk menilai kemampuan bisnis suatu organisasi. Pengukuran global metode *TOC* yaitu laba bersih, ROI dan Cash Flow. Keuntungan dari metode ini yaitu metode ini mudah untuk diakses dan dipahami. Namun, metode *TOC* dinilai masih kurang lengkap untuk melakukan pengukuran kinerja. (Jufina, 2016)

Beberapa metode yang telah dijabarkan di atas merupakan sebagian besar metode pengukuran kinerja yang telah berlaku dan diterapkan

sebelumnya. Seiring dengan perkembangan zaman, metode pengukuran kinerja pun dapat terus bekerja. Pada dasarnya, tidak ada metode pengukuran yang dapat dinilai sebagai metode yang paling tepat dan benar. Hal ini dikarenakan setiap perusahaan memiliki fokus, ruang lingkup dan lingkungan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, setiap pemimpin perusahaan dapat menggunakan metode pengukuran kinerja yang sesuai dengan perusahaan dan perkembangan zaman.

#### **2.2.4 Pendapatan Asli Desa (PADes)**

Pendapatan asli desa adalah pungutan dan/atau pendapatan yang dimasukkan ke rekening desa, yang merupakan pendapatan dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain yang dilakukan oleh sebuah desa. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Mengacu pada UU No.6 Tahun 2016 tentang Desa, Pasal 72 ayat (1) menjelaskan bahwa pendapatan desa dapat bersumber dari :

1. Pendapatan asli Desa atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
4. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana berimbang yang diterima Kabupaten/Kota.
5. Dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.

6. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
7. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
8. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Menurut Permendagri 113/2014, pendapatan desa dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu :

1. Pendapatan Asli Desa (PADes), Pendapatan asli desa adalah pungutan dan/atau pendapatan yang dimasukkan ke rekening desa, yang merupakan pendapatan dari hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain yang dilakukan oleh sebuah desa.
2. Transfer, pendapatan desa jenis ini bersumber dari pemerintah (baik pusat maupun kabupaten) yaitu poin b sampai dengan f diperbolehkan melalui transfer antar rekening yaitu dari rekening kabupaten atau provinsi ke rekening kas desa.
3. Pendapatan lain-lain, merupakan pendapatan yang bersumber dari hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan desa yang sah (huruf g dan h). Keseluruhan pendapatan desa akhirnya harus tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

### 2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan tinjauan di atas yaitu penelitian dilakukan untuk menganalisis kinerja BUMDes yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Yang menjadikan acuan dari teori ini adalah jika kinerja BUMDes semakin baik dan sesuai dengan tujuan yang direncanakan maka akan semakin meningkat pendapatan asli desa yang mampu di kontribusikan dari BUMDes itu sendiri.

**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

